

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal yang esensial dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia. Pembangunan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dan regional, karena ini adalah sarana untuk mencapai pemerataan pembangunan dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan mayoritas penduduk pedesaan. Pengembangan di wilayah pedesaan dapat tercapai melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. (Salihin, 2021) Melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi ini, pembangunan dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menggali potensi ekonomi yang berakar pada masyarakat. Pengembangan ekonomi di tingkat pedesaan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus tentang tata kelola pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut (Prasetyo, 2019) Desa merupakan satuan politik terkecil dalam

tatanan pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam pilar pembangunan nasional. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang dapat memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan untuk percepatan keberhasilan pembangunan nasional. (Wibowo & Alfarisy, 2020)

Pembangunan pedesaan, yang telah diatur dalam undang-undang desa, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan melalui upaya-upaya seperti penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Barru, 2022). Semua ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, daya tarik wisata, pengetahuan lokal, serta potensi lainnya. Dengan demikian, pedesaan dapat menjadi mandiri dan mencapai perkembangan yang lebih baik.

Desa diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat untuk menjadikan desa tersebut lebih maju dan mandiri. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mempercepat perkembangan pedesaan, meskipun hasilnya belum mencapai peningkatan yang berarti dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pembangunan pedesaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam konteks pembangunan nasional dan regional, karena itu merupakan elemen kunci dalam upaya pemerataan pembangunan dan dapat secara langsung mempengaruhi kehidupan sebagian besar penduduk pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka (Salihin,

2021). Undang-Undang Desa bertujuan utama untuk memastikan bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar dapat berkembang, mandiri, kuat, dan demokratis, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan pemerintahan yang efektif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pertumbuhan dan pengembangan kesejahteraan. Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah hadir untuk mengelola potensi perekonomian desa. Sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Potensi yang dapat dimanfaatkan dengan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Di era modern ini, BUMDes telah menjadi bagian integral dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui berbagai inisiatif bisnis seperti pertanian,

perikanan, agrowisata, serta berbagai usaha mikro dan kecil lainnya, BUMDes memberikan harapan baru bagi masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan desa-desa dengan pasar yang lebih luas, membantu mereka mengakses sumber daya dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau.

Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif, dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. (Sasauw et al., 2018)

Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Sumber dana BUMDes Pandak dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes yaitu mensejahterakan masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Pandak bekerja sebagai petani. Unit usaha yang dinaungi oleh BUMDes Ngudi Rezeki yaitu warung pertanian yang melakukan penjualan pupuk organik dan kimia, penyediaan pakan lele dan simpan pinjam. Karena usaha tersebut masih tergolong baru dan dalam tahap percobaan oleh karena itu BUMDes Ngudi Rezeki diharapkan dapat menjadi instrumen dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Pandak. Agar pengembangan usaha BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik, mengembangkan jaringan usaha lain dan diharapkan manfaat dari usaha BUMDes tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Setiap usaha yang dijalankan baik usaha perdagangan ataupun usaha jasa, tentunya akan mengalami suatu masalah atau kendala dalam menjalankannya. Seperti yang dialami BUMDes Ngudi Rezeki, dimana berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, terdapat adanya beberapa masalah yang dialami BUMDes tersebut. Adanya masalah yang dialami oleh BUMDes tersebut yakni dalam sistem pelaporan serta pertanggungjawaban, dimana BUMDes Ngudi Rezeki masih menggunakan pencatatan secara manual dan belum menggunakan pencatatan secara otomatis. Di sisi lain, karyawan yang bekerja di BUMDes juga menjalankan tugas-tugas lain selain mengurus BUMDes, sehingga pekerjaan di BUMDes bukan yang utama bagi mereka. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, termasuk dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu alat ukur efektivitas yang dikemukakan oleh Steers, yakni adaptasi. Adaptasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah pengisian tenaga kerja.

Terdapat masalah yang lain dalam BUMDes Ngudi Rezeki yaitu dalam administrasi dan pencatatan yang kurang terstruktur dengan baik khususnya dalam usaha simpan pinjam. Dalam usaha penyediaan pakan lele juga terdapat masalah pada pemegang usaha dan karyawan penyediaan pakan lele sudah tidak dapat

menjalankannya. Dikarenakan tidak transparansinya dalam melaporkan keuangan disebabkan juga oleh kurangnya modal usaha yang kurang sehingga mengakibatkan usaha BUMDes penyediaan pakan lele sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Melihat dari masalah tersebut bahwa sosialisasi itu sangat penting. Sosialisasi merujuk pada keterampilan penyelenggaraan program dalam menyebarkan informasi tentang program secara efektif, sehingga semua orang, terutama peserta program, dapat memahami secara menyeluruh mengenai pelaksanaan program tersebut. Proses sosialisasi ini merupakan salah satu tolak ukur efektivitas, hal ini dikemukakan oleh Steers yakni integrasi. Integrasi pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dengan organisasi lain dan pengembangan konsensus. Dengan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat tentang BUMDes, maka masyarakat akan memanfaatkan dengan baik keberadaan BUMDes tersebut.

Dengan adanya integrasi dan adaptasi yang merupakan ukuran efektivitas, selanjutnya pencapaian tujuan juga menjadi tolak ukur efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini. Semua usaha untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Dengan pendekatan ini, untuk meningkatkan pencapaian tujuan akhir, dibutuhkan tahapan. Ini berarti tahapan dalam mencapai setiap bagian dari tujuan, serta tahapan dalam pengaturan periode waktu. Pencapaian tujuan melibatkan berbagai faktor, termasuk: sasaran yang merupakan target yang kongkrit dan kurun waktu. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah dengan adanya BUMDes nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Ngudi Rezeki” Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Ngudi Rezeki” sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen?”
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas BUMDes Ngudi Rezeki dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Rezeki sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan sebagai salah satu sumbangan untuk pengembangan teoritis khususnya dalam kajian masalah efektivitas BUMDes terhadap instrumen pemberdayaan ekonomi desa.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, dan bahan masukan bagi BUMDes Desa Pandak, ataupun sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan praktisi dan akademisi masyarakat dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan menjadi bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 15 Literature Review yang memiliki permasalahan yang berbeda. penelitian terkait dengan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi desa, atau tema yang berkaitan dengan judul tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adanya 15 literatur yang menjadi basis analisis menunjukkan keberagaman dalam pendekatan dan sudut pandang yang diterapkan oleh berbagai peneliti sebelumnya.

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil Temuan
1.	(Sasauw et al., 2018)(Sasauw et al., 2018)Regia Nadila Pradini (Pradini, 2020)	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik Vol.2, No.1.	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes di Desa Kedungturi berjalan dengan efisien karena strategi pengembangan yang diterapkan berhasil, menghasilkan dampak positif yang signifikan. Keberhasilan ini disebabkan oleh analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal BUMDes tersebut. Jika strategi ekspansif ini diterapkan dengan efektif, maka pencapaian kesuksesan BUMDes Surya Sejahtera bisa ditingkatkan lebih lanjut.
2.	Roni, Dumadi (Roni & Dumadi, 2022)	Kebijakan Kepala Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kewarganegaraan Vol.6, No.2.	Hasil Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan kepala daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat telah ditemukan memiliki hasil analisis yang positif dan hubungannya yang kuat. Pembangunan ekonomi di pedesaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan hasil analisis yang positif dan hubungannya yang sangat kuat. Ketika kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan dijalankan Bersama-sama, hasil penelitian menunjukkan Nilai positif dan tingkat hubungan yang kuat di antara keduanya.
3.	Jerry Sonny Lintong, Esrie , A.N.Limpeleh, Barno Sungkowo (Lintong et al., 2020)	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan	Hasil temuan menunjukkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) belum mencerminkan penyediaan laporan keuangan yang holistik. Saat ini, laporan yang disajikan hanya mencakup pencatatan harian mengenai arus

No.	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil Temuan
			kas, yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang tunai. Namun, laporan ini tidak memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pada akhir periode dan tidak memberikan informasi mengenai laba atau rugi yang diperoleh oleh BUMDes selama periode tersebut.
4.	Siti Rahayu, Rury Febrina. (Rahayu & Febrina, 2021)	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. Jurnal Trias Politika, Vol 5. No.1.	Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan BUMDES Nibung menjadi suatu prestasi yang luar biasa bagi penduduk Desa Sungai Nibung. Ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kondisi desa dengan memperkuat ekonomi dan meraih kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui pemberian layanan kepada warga serta pengembangan sumber daya desa, BUMDES Nibung turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan desa secara keseluruhan.
5.	Jajang Abdul Nurhasan, Asep Hamdan Munawar (Abdul Nurhasan & Hamdan Munawar, 2020)	Efektivitas Peran Bumdes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Penjalu Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer	Hasil Penelitian didapatkan bahwa pengelolaan BUMDes melibatkan unit usaha masyarakat, seperti mengurus pasar, mengelola usaha produktif di rumah tangga, dan unit jasa lainnya. Beberapa dari unit-unit ini memberikan peluang bagi penduduk desa untuk mendapatkan pekerjaan baru. Oleh karena itu, BUMDes dapat menjadi strategi yang berhasil untuk menggerakkan potensi yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan penduduk desa.
6.	Baretha M Titioka, Meny Huliselan, Abdullah Sanduan	Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru.	Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terlihat bahwa tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola,

No.	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil Temuan
	Fransiska N Ralahallo, Astrid J.D. Siahainenia (Titioka et al., 2020)	Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen&Akuntansi)	BUMDes tentang praktik tata kelola BUMDes yang efektif, akuntabel, dan transparan masih cukup rendah. Namun, aktivitas Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru mendapat dukungan dan umpan balik positif dari pemerintah kabupaten serta seluruh peserta pelatihan.
7.	Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya (Wahed et al., 2020)	Pengembangan Ekonomi Desa dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Journal of Regional Economics Indonesia	Hasil Penelitian menunjukkan adanya Ketidakproduktifan BUMDesa di daerah Madura dapat dijelaskan oleh tiga faktor utama: pertama, kurangnya pemahaman tentang cara mengelolanya; kedua, rendahnya kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa; dan ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di masing-masing desa.
8.	Ayu Lestari (Lestari, 2021)	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Vol.3, No. 1.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal mencapai tujuan BUMDesa, tampaknya bahwa hal ini belum memberikan dampak yang signifikan pada penduduk desa Buntuna. Ini terbukti dari beberapa unit usaha yang beroperasi, yang tidak mempertimbangkan kondisi dan potensi desa, terutama karena mayoritas penduduknya adalah petani. Padahal, salah satu tujuan utama pendirian BUMDesa adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan memberdayakan masyarakat dalam pembentukan unit-unit usaha Desa, namun hal ini belum terwujud sepenuhnya.
9.	Agus Salihin (Salihin, 2021)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik.	Hasil temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja BUMDes Desa Pejanggik tidak memuaskan dan belum berhasil secara substansial meningkatkan taraf ekonomi penduduk Desa

No.	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil Temuan
		Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah	Pejanggik. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan modal yang tersedia, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, serta kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
10.	Yayu Putri Senjani (Senjani, 2019)	Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil temuan ini menunjukkan bahwa manajemen BUMDes saat ini masih sederhana, namun mereka telah merencanakan perbaikan di masa yang akan datang. Meskipun BUMDes memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, peran mereka belum sepenuhnya terlihat karena adanya beberapa kekurangan dalam sistem manajemen. Karena alasan ini, kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa belum dapat diukur secara pasti
11.	Maria Rosa Ratna Anggraeni (Anggraeni, 2019)	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta Jurnal Modus Vol.28 No.2.	Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dapat disangkal telah menciptakan perubahan dalam sektor ekonomi dan sosial. Namun, dampak positifnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak begitu nyata. Beberapa masalah yang timbul terkait dengan BUMDes adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap air dan kendala dalam mencari pekerjaan di BUMDes.
12.	Iit Novita Riyantidan, Hendri Hermawan Adinugraha (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021)	Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)	Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat desa Bodas sudah memiliki pengetahuan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Singajaya, minat mereka untuk terlibat dalam pelaksanaannya masih terbatas. BUMDes Singajaya berperan dalam meningkatkan pengelolaan

No.	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil Temuan
		Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam	ekonomi produktif di desa ini. Peran BUMDes Singajaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bodas cukup positif, meskipun dalam skala kecil. Ini terlihat dari penciptaan lapangan kerja baru yang membantu mengurangi angka pengangguran, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan penyewaan barang seperti layos dan mesin molen untuk aspal, meskipun pengelolaannya belum mencapai tingkat optimal.
13.	aka sulaksana, Irni Nuryanti. (Sulaksana et al., 2019)	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasus di BUMDes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, Nomor 2	Hasil temuan menunjukkan bahwa terlihat bahwa BUMDes Mitra Sejahtera didirikan pada tahun 2015 dan memiliki tiga sektor usaha yang dioperasikannya, termasuk pengelolaan lahan gunung, kios pertanian, dan bisnis otomotif (grasstack). Penelitian ini mengamati sejumlah faktor internal yang mempengaruhi BUMDes Mitra Sejahtera, seperti manajemen, keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, dan regulasi, sementara faktor lingkungan eksternal yang diamati mencakup teknologi, mitra bisnis, pemerintah, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan pesaing.
14.	Supardi, Etha Listiany, Budiwitjaksono (Supardi & Budiwitjaksono, 2021)	Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih. Jurnal JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)	Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam mengelola aset di BUMDes Rosa Bungur Mandiri adalah keterbatasan dana yang menyebabkan hambatan dalam menjalankan operasional unit usaha. Akibatnya, upaya untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan dengan optimal.

No.	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil Temuan
15.	Surya Bakti, Desi Rama Sari (Bakti et al., 2023)	Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Warohmah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Jurnal Proceeding International Seminar on Islamic Studie	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat telah berhasil dalam peran dan efektivitasnya dalam memberdayakan masyarakat. BUMDES berfungsi sebagai platform yang berhasil mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan awal BUMDES itu sendiri. Kemajuan unit-unit usaha yang didukung oleh dana desa telah memberikan beragam manfaat signifikan bagi masyarakat, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penyediaan berbagai program edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat

Dari beberapa studi terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya hanya menjelaskan tentang strategi dalam pengelolaan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat di berbagai desa yang ada di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu terdapat juga hasil yang menjelaskan terkait efektivitas pengelolaan BUMDes dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, dan terdapat juga kebijakan kepala daerah dalam pengembangan ekonomi pedesaan, pengelolaan keuangan BUMDes, serta peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Namun, Pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait BUMDes sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas BUMDes

sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya juga terletak dalam lokasi penelitian. Penelitian ini fokus dalam BUMDes “Ngudi Rezeki” yang berada di Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dimana dalam penelitian sebelumnya belum pernah ada yang meneliti di lokasi tersebut. Penelitian ini akan menjadi penelitian yang pertama dalam BUMDes “Ngudi Rezeki” di Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "effective," yang mengacu pada kemampuan suatu tindakan untuk mencapai keberhasilan. Dalam kamus ilmiah yang lebih dikenal, efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sesuatu berguna, memberikan hasil yang diinginkan, atau mendukung pencapaian tujuan tertentu. Biasanya efektivitas diukur dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam konteks operasional maupun operatif.

Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil atau output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, jika apa yang telah dicapai atau dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sejak awal, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi, program, atau kegiatan tersebut telah mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan (Dimianus, 2014). Menurut (Yulita & Supryanto, 2022) Efektivitas merupakan kondisi yang mempengaruhi kesan,

keberhasilan, kinerja yang efisien, tindakan, atau situasi yang sedang berlangsung. Efektivitas adalah suatu indikator yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah lembaga atau organisasi dapat dicapai. Hal ini memiliki peran penting dalam setiap lembaga atau organisasi dan digunakan untuk mengukur kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh entitas tersebut.

a. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan adalah tugas yang kompleks, karena efektivitas dapat dievaluasi dari berbagai perspektif yang bervariasi tergantung pada orang yang menilai dan menginterpretasinya. Jika dipandang dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi akan mengartikan efektivitas sebagai sejauh mana kualitas dan jumlah (output) barang dan layanan yang dihasilkan. Tingkat efektivitas juga dapat dinilai dengan membandingkan rencana awal yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Akan tetapi, jika tindakan atau usaha yang dilakukan tidak sesuai sehingga mengakibatkan ketidakcapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dapat dianggap tidak efektif. Alat ukur tingkat efektivitas menurut Streers ada 3 yaitu; pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi.

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran yang merupakan target konkrit dan dasar hukum.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : pengisian tenaga kerja dan sarana prasarana.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan mampu untuk mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Menurut Steers terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut adalah faktor-faktornya:

1) Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi adalah terhadap struktur dan organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

2) Karakteristik Lingkungan (ketetapan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3) Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh

langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

4) Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pemberdayaan" berasal dari kata dasar "daya," yang berarti kemampuan atau kekuatan. Kata dasar tersebut ditambahkan awalan "ber" sehingga menjadi "berdaya," yang merujuk pada kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian, kata "berdaya" diberi awalan "pe" dan akhiran "an," sehingga menjadi "pemberdayaan," yang memiliki makna memberikan kemampuan kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan suatu tindakan. Pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kapabilitas dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau komunitas, sehingga mereka dapat secara optimal mengungkapkan identitas, aspirasi, dan nilai-nilai mereka sendiri, serta dapat bertahan dan tumbuh secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memperkuat struktur kelembagaan dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan keluar dari situasi kemiskinan serta keterbelakangan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, masyarakat sendiri yang menjadi pelaku dan pengambil keputusan dalam proses pembangunan. Usulan-usulan yang berasal dari masyarakat menjadi landasan untuk program-program pembangunan di tingkat lokal, regional, bahkan nasional. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan peluang yang berkaitan dengan pembangunan dan kehidupan mereka sendiri.

Menurut (Ulum, 2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses yang bersifat individual dan sosial; itu merupakan pembebasan kapabilitas pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan tindakan. Dalam pandangan Ginanjar (1996), pemberdayaan adalah usaha untuk mengembangkan kapabilitas seseorang dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya. Selain itu, juga melibatkan upaya untuk memperkuat dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal tersebut, perlu untuk dicatat bahwa pemberdayaan tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kurang kemampuan, tetapi juga berlaku untuk masyarakat yang memiliki potensi terbatas yang dapat ditingkatkan hingga mencapai kemandirian. Menurut (Umar, 2019), Konsep dalam pemberdayaan masyarakat juga dikenal dengan istilah "tri bina" yaitu:

1. Bina Manusia

Bina manusia adalah istilah yang merujuk pada upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas, keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan individu atau kelompok manusia. Karena masyarakat yang dibina harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep pemberdayaan yang akan diterapkan di daerah tersebut.

2. Bina Usaha

Bina usaha adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk membangun, mengembangkan, atau memperkuat usaha atau bisnis. Bina usaha merupakan komponen penting dalam proses pemberdayaan karena bina usaha sesuai dengan jenis usaha yang dipilih dalam konteks pemberdayaan.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan alam dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Ini melibatkan tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.

Kemudian, kata "ekonomi" berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "oikos" dan "nomos." Ini mengacu pada pengelolaan rumah tangga yang efisien yang dapat dicapai. Dalam konteks ini, istilah ekonomi menggambarkan proses atau upaya dalam memperoleh barang dan

jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, bisnis, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas.

Sedangkan pengertian masyarakat merujuk pada sekelompok individu atau manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau ruang lingkup tertentu dan memiliki interaksi sosial. Masyarakat adalah entitas sosial yang terbentuk melalui hubungan antarindividu yang saling mempengaruhi dan biasanya memiliki norma-norma, aturan, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam masyarakat, individu-individu ini dapat berbagi nilai-nilai, tujuan, kepercayaan, serta mematuhi norma dan peraturan tertentu yang membentuk dasar tata nilai dan struktur sosial mereka. Menurut (Pemberdayaan ekonomi) masyarakat sekelompok individu yang berinteraksi satu sama lain dan tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki norma-norma, peraturan, dan budaya yang serupa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk memberikan masyarakat akses terhadap sumber daya ekonomi, peluang usaha, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidup dan mampu mencukupi kebutuhan

hidupnya, serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan melalui pemberdayaan ekonomi.

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian pendekatan, strategi, dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, partisipasi, dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya tentang memberikan bantuan atau sumber daya kepada masyarakat, tetapi juga tentang memberikan mereka alat, pengetahuan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, mengelola sumber daya, mengatasi masalah, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Proses dan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo memiliki tiga tahapan yaitu:

1) Tahap Pengadaran

Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu”. Tahap ini dapat melalui sosialisasi atau penyuluhan.

2) Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini masyarakat diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Pada dasarnya memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Dalam konteks ini, masyarakat

memperoleh pemahaman dan keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.

3) Tahap Pembangunan

Dalam tahap ini proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecukupan penerima. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola proses pemberdayaan mereka, yang melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, faktor internal sangat penting karena mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Namun, perlu juga memberikan perhatian pada faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang memerlukan bantuan dari fasilitator multi-disiplin. Peran tim ini sangat aktif dalam mendorong masyarakat yang sedang diberdayakan, tetapi seiring berjalannya waktu, peran mereka akan secara bertahap berkurang saat masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjalankan kegiatan mereka sendiri.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk memberikan mereka alat, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Menurut (Endah, 2020) Tujuan pemberdayaan adalah menciptakan perubahan dalam masyarakat sehingga mereka menjadi lebih

mandiri dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi mereka sendiri. Kemandirian mencakup kemampuan individu atau masyarakat untuk berpikir secara mandiri, mengambil tindakan, dan mengendalikan aktivitas mereka sendiri. Kemandirian masyarakat terlihat ketika mereka mampu memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan tindakan yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan menggunakan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kelembagaan usaha yang berfokus pada asset dan sumber daya ekonomi di desa untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut (Sidik, 2020) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hasil dari manajemen yang produktif yang melibatkan kerja sama, partisipasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan. Hal ini juga memiliki dampak yang signifikan pada sektor ekonomi, terutama dalam mengubah situasi ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Seperti yang kita ketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wujud nyata dari upaya pemberdayaan berbagai jenis usaha lokal yang sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Pada dasarnya, lembaga atau organisasi ini berfungsi sebagai tempat untuk menghimpun ide-ide dari masyarakat desa, mengelola potensi yang dimiliki oleh desa, dan mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di desa tersebut.

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) memang sepenuhnya memiliki hak untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa adanya perintah dari

pemerintah daerah. Karena dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemerintah Desa beserta masyarakat memang dituntut untuk mandiri. Maka diperlukan beberapa prinsip-prinsip guna mendukung keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, serta sustainable. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu sebagai pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Helwig et al., 2020).

a. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dasar hukum tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbeda-beda di setiap negara, karena regulasinya tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, sebagai contoh, BUMDes diatur dalam berbagai peraturan dan perundangan yang relevan, termasuk:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pasal 87 sampai 90. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang desa, termasuk pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai berbagai aspek pelaksanaan Undang-Undang Desa termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 - 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun perlu diingat bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdiri atas inisiatif masyarakat berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. lain kata lain, pendirian BUMDes tidak bersifat baku yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Jika hal tersebut terjadi, khawatirnya BUMDes tidak akan beroperasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang terdapat dalam Bab 2 Pasal 3, terdapat 7 tujuan dari pendirian Badan usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa,
- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- 4) Pengembangan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja,
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

c. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai berikut :

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga komersil yang membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
- 3) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

d. Pendirian Badan usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah hasil dari upaya mengelola ekonomi produktif di desa dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan inisiatif dari masyarakat desa itu sendiri. Dengan kata lain, usaha yang akan diwujudkan melalui BUMDes berasal dari keinginan dan semangat untuk menciptakan kemajuan di komunitas desa. Oleh karena itu, diharapkan BUMDes memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

e. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Organisasi pengelola BUMDes seharusnya diatur secara terpisah dari organisasi pemerintahan desa untuk menjaga independensi dan transparansi dalam pengelolaan usaha-usaha ekonomi di tingkat desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes dapat mencakup beberapa peran utama, seperti berikut:

- 1) Penasihat;
- 2) Pelaksana Operasional; dan
- 3) Pengawas.

Struktur pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan ditetapkan melalui proses musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri terkait Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa. Penting untuk menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes agar pemahaman tentangnya sama di kalangan pemerintah desa, anggota (penyerta modal), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kabupaten (PemKab), dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1) Kooperatif

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik untuk mendukung perkembangan dan kelangsungan usaha tersebut.

2) Partisipatif

Semua anggota yang terlibat dalam BUMDes harus siap, baik secara sukarela maupun diminta, untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat memacu kemajuan usaha BUMDES.

3) Emansipatif (kesetaraan)

Semua individu yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang perbedaan golongan, suku, atau agama, sehingga mereka memiliki hak dan posisi yang sama.

4) Transparansi

Kegiatan yang memiliki dampak terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diakses dan diinformasikan secara transparan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang sederhana dan terbuka.

5) Akuntabel

Semua kegiatan usaha harus dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknis maupun administratif.

6) Sustainable (berkelanjutan)

Usaha-usaha ekonomi harus bisa tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat melalui BUMDes sebagai platformnya.

f. Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Dalam pasal 14 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 berisi modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersumber dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota), pinjaman dan kerja sama usaha dengan pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal yang dimiliki oleh BUMDes dari pemerintah desa merupakan aset desa yang telah disisihkan. Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dapat berupa dana untuk keperluan bantuan. BUMDes dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk berbisnis bersama. (Bab 2) BUMDES juga dapat mengajukan pinjaman

ke lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Sebanyak 51% dari modal BUMDES berasal dari desa, sedangkan sisa modalnya berasal dari kontribusi modal dari pihak lain.

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu konteks mencakup evaluasi dan pengukuran sejauh mana suatu tindakan, program, atau sistem berhasil mencapai hasil yang diinginkan atau yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan dampaknya.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kualitas hidup ekonomi masyarakat melalui berbagai strategi, program, dan tindakan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, menghasilkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

H. Definisi Operasional

Di bawah ini merupakan Definisi Operasional dari penelitian terkait dengan bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen

pemberdayaan ekonomi yang kemudian akan dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

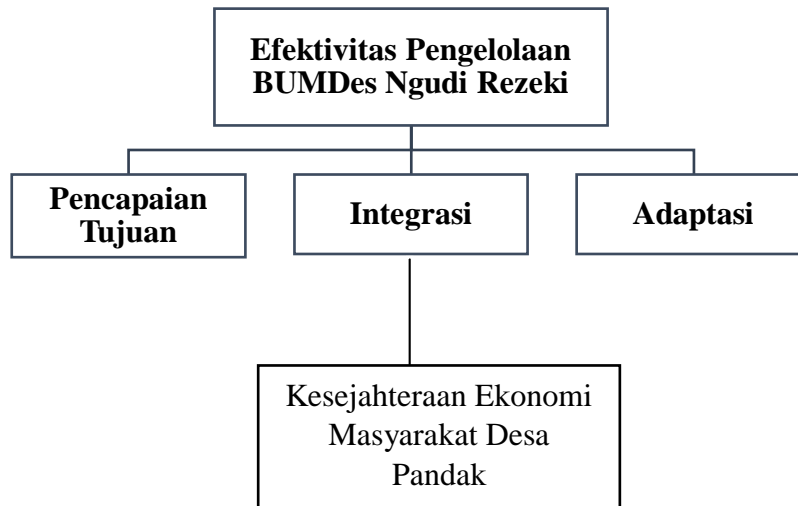
Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Ngudi Rezeki”	a. Pencapaian Tujuan	1) Sasaran merupakan target yang kongrit 2) Penciptaan jaringan pasar oleh BUMDes 3) Peningkatan Pendapatan Asli Desa 4) Peningkatan pendapatan anggota 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum
		b. Integrasi	1) Mengadakan sosialisasi 2) Pengembangan konsensus 3) Komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya
		c. Adaptasi	1) Pengisian tenaga kerja 2) Sarana dan prasarana
2.	Faktor yang mempengaruhi efektivitas	a. Karakteristik Organisasi	1) Meningkatkan spesialis fungsi struktur organisasi 2) Pemanfaatan teknologi
		b. Karakteristik Lingkungan	1) Ketetapan atas keadilan lingkungan
		c. Karakteristik pekerjaan	1) Perbedaan sifat pekerja
		d. Kebijakan dan praktek manajemen	1) Penetapan tujuan strategis 2) Pencairan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien 3) Proses komunikasi

I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk mempermudah pembaca dan peneliti dalam memberikan wawasan penelitian ini. Selain itu juga memiliki tujuan sebagai arah tujuan pada penelitian yang dilakukan. Berikut ialah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, penelitian ini memberikan gambaran terhadap efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mengidentifikasi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis dan sebagainya untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistic (Abdussamad & SIK, 2021). Untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan maka akan dilakukan wawancara kepada instansi Pemerintah Desa Pandak terkait khususnya pada pengelola Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Ngudi Rezeki. Pendekatan secara kualitatif diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan tidak terdapat angka. Data tersebut nantinya diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto atau video, dokumentasi pribadi, catatan dan dokumentasi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Ngudi Rezeki” yang terletak di Desa Pandak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan yang pertama Desa pandak secara umum memiliki 8 dusun, diantaranya: Dusun Ngelo, Pojok, Prampelan, Joho, Karanguni, Pandak, Senden, dan Karangmanis. Desa Pandak memiliki Potensi desa dan Sumber Daya Alam di Desa Pandak yang bagus dikarenakan letak geografis yang berdekatan dengan sungai dan area persawahan. Pembangunan di desa Pandak sudah tergolong maju, karena memiliki jalan utama yang baik, penggunaan jamban sehat, banyaknya rumah warga layak huni dan penggunaan air bersih yang telah merata di seluruh masyarakat Desa Panda. Dari sini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari BUMDes di Desa Pandak dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian bagi desa melalui pengelolaan di BUMDes Ngudi Rezeki tersebut.

3. Unit Analisa Data

Tabel 1. 3 Unit Analisa Data

No	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Pemerintah Desa Pandak	2	a. Kepala Desa Pandak b. Sekretaris Desa Pandak
2.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Ngudi Rezeki”	10	a. Ketua BUMDes “Ngudi Rezeki.” (1) b. Pengurus BUMDes “Ngudi Rezeki”. (2) c. Pekerja BUMDes/Pengelola BUMDes “Ngudi Rezeki”. (2) d. Masyarakat Desa Pandak (5)

4. Jenis Data

Menurut Moelong (2005:157) bahwa dalam jenis data atau sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview secara langsung dan pengamatan secara mendalam. Sumber data primer dihimpun melalui proses wawancara dengan subjek penelitian dan pengamatan yang langsung dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari hasil interaksi wawancara serta hasil pengamatan yang diperoleh dengan cara berbicara langsung dengan Pemerintah Desa Pandak, Pengurus BUMDes, pengelola BUMDes, serta Masyarakat Desa Pandak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, literatur, buku, arsip, atau dokumen pemerintah yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder berisi informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen yang mencatat konsep penelitian atau topik yang relevan di unit analisis yang menjadi subjek penelitian. Data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelum pelaksanaan penelitian atau berasal dari sumber kedua. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen terkait BUMDes, undang-undang dan penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua informasi secara objektif sesuai dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dengan mencatat berbagai bentuk data yang ada di lingkungan penelitian (Sugiyono, 2010:338). Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Teknik Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dimana peneliti mengadakan percakapan langsung dengan individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, mendalam, dan kontekstual tentang pandangan, pengalaman, pengetahuan, atau pendapat subjek terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilaksanakan untuk mengumpulkan data terkait efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi di Desa Pandak. Dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menggali data atau informasi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Rezeki melalui informan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa pandak (Kepala Desa Pandak dan Sekretaris Desa Pandak)
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa “Ngudi Rezeki” Desa Pandak
3. Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Ngudi Rezeki” Desa Pandak (Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes)
4. Masyarakat Desa Pandak.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, penilaian, dan analisis berbagai jenis dokumen atau rekaman yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Beberapa dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Sejarah Desa Pandak
2. Visi dan Misi Desa Pandak
3. Struktur Organisasi BUMDes “Ngudi Rezeki”
4. Unit-unit usaha yang di sekolah BUMDes “Ngudi Rezeki”

5. Dokumen yang terkait dengan BUMDes

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode analisis data deskriptif. Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengeksplorasi, mengorganisasi, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Proses ini melibatkan klasifikasi data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpisah, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, memilih aspek-aspek yang relevan untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan agar data tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dimana aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengurangi, menyederhanakan, dan meringkas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian (Rijali, 2019). Tujuan utama reduksi data adalah untuk membuat data yang lebih terkelompok, fokus, dan relevan sehingga lebih mudah diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan. Dengan mereduksi data, peneliti dapat memahami lebih baik apa yang ada dalam data, membuat kesimpulan yang lebih tajam, dan memudahkan penyajian hasil penelitian kepada audiens. Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk menyaring data-data yang diperoleh pada saat proses pengumpulan data, agar data yang didapatkan tidak berulang-ulang. Maka dari itu peneliti membuat

ringkasan terhadap hal-hal yang menyangkut objek penelitian saja yakni daya yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alat pemberdayaan ekonomi di Desa Pandak.

b. Penyaji Data

Penyajian data dalam teknik analisis data merujuk pada proses menampilkan hasil analisis data secara visual atau naratif sehingga mudah dimengerti oleh pembaca atau audiens. Menurut (Rijali, 2019) Penyajian data adalah proses di mana sejumlah informasi diatur dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan temuan penelitian, pola, atau informasi yang ditemukan dari data kepada pihak yang berkepentingan. Penyajian data menjadi penting karena membantu memvisualisasikan hasil analisis dengan cara yang lebih jelas dan dapat diinterpretasikan. Data-data ini kemudian disusun dalam bentuk narasi berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan berbagai fenomena yang diamati. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara data, menghasilkan kesimpulan yang dapat diambil, dan memberikan makna pada data yang disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses atau tindakan mengambil suatu keputusan atau pandangan berdasarkan informasi, data, fakta, atau bukti yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Penarikan kesimpulan membantu peneliti atau individu untuk membuat rangkuman atau generalisasi yang didukung oleh

bukti-bukti yang ada. Dalam konteks penelitian atau ilmu pengetahuan, penarikan kesimpulan biasanya dilakukan setelah analisis data, di mana hasil analisis digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan atau temuan. Kesimpulan ini dapat berupa jawaban terhadap pertanyaan penelitian, pembuktian atau penolakan hipotesis, atau generalisasi tentang fenomena yang diamati.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diperiksa dan divalidasi selama berlangsungnya penelitian, dengan melibatkan beberapa langkah: (1) merefleksikan kembali selama proses penulisan, (2) memeriksa kembali catatan lapangan, (3) berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk mencapai pemahaman bersama, (4) melakukan upaya ekstensif untuk mengintegrasikan temuan ke dalam konteks data yang lebih luas. (Rijali, 2019)